

**DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK**  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**EKO SETIAWAN**

**1551030030**

**Prodi : Ekonomi Syariah**



**PRODI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 / 2020 M**

**DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK**  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**EKO SETIAWAN**

**NPM. 1551030030**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt. CA.**

**Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018 merupakan salah satu reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong pemenuhan pajak secara sukarela. PP No.46/2013 di terbitkan pada tanggal 1 Juli 2013 PP No.23/2018 diterbitkan tanggal 1 Juli 2018. Dari masing-masing penerbitan mempunyai tarif pajak yang berbeda yaitu PP No.46/2013 adalah 1% dan PP No.23 tahun 2018 adalah 0.5% dari jumlah wajib pajak atas omset atau penjualan bruto yang kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 24 bulan yaitu 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP No.23 Tahun 2013 dan untuk menjelaskan apakah PP No.46/2013 dan PP No.23/2018 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak menurut pandangan Ekonomi Islam di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian jika dilihat dari pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menunjukan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 1.7% sedangkan 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 37.87%. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini bisa dikatakan pertumbuhan jumlah wajib pajak sangat berkembang pesat dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Kedepanya pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP harus meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat secara menyeluruh. Dan menurut pandangan Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton ini memenuhi 2 prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu perwakilan (*khalifah*) dan keadilan.

Kata kunci : Pertumbuhan, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Perspektif Ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Setiawan  
NPM : 1551030030  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pph Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buata agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 03 Oktober 2019

Penyusun

**Eko Setiawan**  
**NPM. 1551030030**







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

**: Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46  
Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPh  
Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah  
Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Kedaton Bandar Lampung)**

**Nama**

**: Eko Setiawan**

**NPM**

**: 1551030030**

**Jurusan**

**: Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas**

**: Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt. CA.**

**Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**NIP. 197009262008011008**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah**

**Madnasir, S.E., M.S.I.**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukaramé, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak”** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung), disusun oleh **Eko Setiawan, NPM: 1551030030**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at / 26 Juni 2020**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., MM**

**Sekretaris : Dimas Pratomo, M.E.**

**Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak**

**Penguji II : Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Dr. Ruslita Abdul Ghofur, M.S.I**  
**NIP. 198008012003121001**





## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’[04] : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Pramono dan Ibu Suprihatin tercinta, terimakasih atas setiap do'a, motivasi, kasih sayang yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap langkahku menuntut ilmu.
2. Adikku tersayang Eva Setiawati dan Buyut ALM Madikem yang telah menjadi motivasi penulis untuk sukses
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Eko Setiawan, lahir pada tanggal 24 April 1997 di desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 01 Sinar Laga, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 04 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2015.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPH Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sholawat serta salam disampaikan Kepada Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikut-pengikut-Nya yang kita nantikan syafaatNya dihari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.



2. Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.Akt. CA selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku Pembimbing Akademik 2 yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapat barokah dari Allah SWT.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada kami selama di bangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bpk. Pramono dan Ibu Suprihatin, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.
6. Reko Anjariadi, S.E. Ak, MSE, MPP, CA selaku Waskon 4 KPP Pratama Kedaton yang selalu memberikan saran, kritik, serta motivasi dalam menulis skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu belajar, berjuang, dalam menuntut ilmu baik dalam segi External maupun Internal Kampus.
8. Teman-teman seperjuangan kelas B Akuntansi Syari'ah yang selalu bersama dalam proses perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini.

9. Sahabat Merry Yusika Andani yang selalau memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang membantu proses penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan semoga kita selalu menjalankan silaturahmi.

Penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu. Terimakasih banyak untuk segala bentuk do'a dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2019

Penulis

Eko setiawan  
1551030030



## **DATAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Alasan Memilih Judul.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>

## **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Pemahaman Perpajakan .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Pajak.....	19
2. Jenis-enis Pajak .....	20
3. Fungsi Pajak .....	21
4. Teori Pemungutan Pajak .....	23
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	25

6. Pajak Menurut Syariat Islam .....	27
7. Pengertian Wajib Pajak .....	31
<b>B. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 .....</b>	<b>31</b>
1. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	31
2. Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	32
3. Peredaran Bruto .....	32
<b>C. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....</b>	<b>33</b>
1. Devinisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	33
2. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 tahun 2018 .....	34
3. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	34
4. Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	35
<b>D. Perbedaan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan Nomor 23 tahun 2018.....</b>	<b>36</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>38</b>

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>41</b>
1. Profil Dan Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	41
2. Visi, Misi Dan Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	42
3. Wilayah Kerja Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	44
4. Struktur organisai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	49
5. Unit Dan Program Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	54
<b>B. Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 di wilayah KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung .....</b>	<b>55</b>

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

<b>A. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPH Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak .....</b>	<b>65</b>
--	-----------



<b>B. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPH Atas Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Menurut Pandangan Ekonomi Islam .....</b>	<b>75</b>
--	-----------

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>87</b>

## **DATAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	10
1.2 Pertumbuhan Wajib Pajak setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 .....	11
1.3 Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.....	11
1.4 Pertumbuhan Wajib Pajak setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.....	12
2.1 Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 .....	37
3.1 Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	51
3.2 Batasan Waktu Surat Pelaporan Pemberitahuan .....	65
4.1 Sanksi Adminitrasi .....	68
4.2 Denda Adminitrasi .....	69
4.3 Sanksi Pidana .....	70
4.4 Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	72
4.5 Pertumbuhan Wajib Pajak setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 .....	73
4.6 Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.....	74
4.7 Pertumbuhan Wajib Pajak setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran ke-

1. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013
2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
3. Blangko Bimbingan
4. Blangko Wawancara
5. Lampiran Foto



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Pada awal pemulaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “ **DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung )**”. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

1. **Dampak adalah** akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu / sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.<sup>1</sup>
2. **Penerapan adalah** suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>2</sup>
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013** merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas

---

<sup>1</sup> Depatemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, h. 290

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 1448

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif pajak 1% dari penjualannya.<sup>3</sup>

4. **PPH Atas Penghasilan** adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.<sup>4</sup>
5. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari jumlah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang perpajakan
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan di

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan

<sup>4</sup> Isroah, Universitas Negeri Yogyakarta 2013, *perpajakan*, h.39

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak*, 2017 h.4.

kenakan pajak penghasilan yang bersiat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan. PP No 23 tahun 2018 ini merupakan revisian PP Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku 1 Juli 2018.<sup>6</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penelitian ini yang menjadikan alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya di Kantor KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung mengalami kenaikan dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun dari jumlah wajib pajak yang terdaftar belum semua yang melakukan pelaporan atau membayar pajak, terkhusus pajak penghasilan.

### **2. Alasan Subjektif**

Dalam judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Disisi lain banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu peneliti sudah mempunyai atau didukung dengan data-data yang dibutuhkan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

### C. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama.<sup>7</sup> Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan,

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, 2013

<sup>8</sup> Definisi Pajak menurut. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.



menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>9</sup>

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 Surat, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata "pajak", berbeda halnya dengan kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat 1x kata "Pajak", yaitu QS. At-Taubah [9]:29. Kata "Jizyah" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak". Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur'an menerjemahkan kata "Jizyah" menjadi "Pajak" melainkan tetap Jizyah saja, misalnya Kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI.<sup>10</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

<sup>9</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 27-28.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.29

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 29)”.<sup>11</sup>

Direktorat Jenderal Pajak atau yang bisa di singkat (DJP) merupakan sebagai otoritas perpajakan Indonesia mempunyai kepentingan besar untuk memiliki akses terhadap informasi keuangan dalam rangka mempermudah kewenangan pemungutan pajak. Dalam administrasi perpajakan yang menganut sistem *self-assessment*, pengawasan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Wajib Pajak menjadi hal yang mendasar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal sepanjang telah tersedianya akses yang luas bagi DJP untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat.<sup>12</sup>

Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset tertentu sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan media tahun 2013 ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, tranparansi dan peningkatan kontribusi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.30

<sup>12</sup> Kementerian keuangan republik indonesia /DJP laporan tahunan 2017.

masyarakat dalam pembangunan.<sup>13</sup> Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun.<sup>14</sup> Banyak pakar yang menyatakan bahwa kebijakan untuk memajaki Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi, apalagi saatnya dinilai tidak pas karena bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa pengusaha bahkan berencana melakukan uji materi atas ketentuan terbaru ini ke Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan. PP No. 23 tahun 2018 ini merupakan revisian PP Nomor 46 Tahun

---

<sup>13</sup> Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013, / SK.

<sup>14</sup> *Ibid*, pasal 1

2013 mulai berlaku 1 Juli 2018.<sup>15</sup> Berbeda dengan pp no 46 tahun 2013 dengan tarif pajak 1 % dari omset bruto sedangkan pp no 23 tahun 2018 tarif pajak hanya 0.5% dari omset bruto. Selain perbedaan tarif pajak pp 46 dan 23 ini membedakan mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu, 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 januari 2001.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan*

<sup>16</sup> Windy Nawir Mansyur, “*Analisis Penerapan Psak No. 46 pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal*”



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. KPP Kedaton merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Regional Tingkat II Daerah Lampung, Kab Bandar Lampung, Kec. Kedaton, yang tugas utamanya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Kedaton, bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak di Kecamatan Kedaton dan melakukan pembinaan terhadap para pegawai di KPP Pratama Kedaton.<sup>17</sup>

Sumber-sumber penerimaan Negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, Kekayaan Alam, Bea & Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-sumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini, namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan Negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk rakyat yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Buku Profil KPP Pratama Kedaton 2018

<sup>18</sup> DJP-AR 2017

Akan sangat relevan apabila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu. Kita seharusnya juga memandang dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara efektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang direncanakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut bukan berarti akan menempatkan wajib pajak di pihak yang lebih baik, tetapi harus di akui secara jujur, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah**  
**Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kedaton**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Total Wajib Pajak</b>	<b>Wajib Pajak yang mendaftar</b>	<b>Pertumbuhan wajib pajak (%)</b>
<b>2013</b>	Januari	84.797	572	7,42
	Februari	85.393	596	4,2
	Maret	86.034	641	7,55
	April	86.588	554	-13,58
	Mei	87.263	675	21,84
	Juni	97.768	505	-25,19
<b>Rata-rata</b>				<b>0,37</b>

*Sumber : penerimaan wajib pajak perbulan KPP pratama kedaton 2013*

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Wajib Pajak Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah**  
**Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kedaton**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Total Wajib Pajak</b>	<b>Wajib Pajak yang mendaftar</b>	<b>Pertumbuhan wajib pajak (%)</b>
<b>2013</b>	Juli	88.173	405	-19.08
	Agustus	88.458	285	-29.63
	September	88.898	440	54.39
	Oktober	89.319	421	-4.32
	November	89.713	394	-4.98
	Desember	90.173	459	16.05
<b>Rata-rata</b>				<b>2,07</b>

*Sumber : penerimaan wajib pajak perbulan KPP Pratama Kedaton 2013*

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum penerapan Peraturan Pemerintah**  
**Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kedaton**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Total Wajib Pajak</b>	<b>Wajib Pajak yang mendatar</b>	<b>Pertumbuhan wajib pajak (%)</b>
<b>2018</b>	Januari	223.449	683	-
	Februari	224.095	646	-5.42
	Maret	224.786	691	6.96
	April	225.400	614	-11.14
	Mei	225.972	572	-2.76
	Juni	226.244	272	-52.44
<b>Rata-rata</b>				<b>-10,8</b>

*Sumber : penerimaan wajib pajak perbulan KPP pratama kedaton 2018*

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan Wajib Pajak sesudah penerapan Peraturan Pemerintah**  
**Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Kedaton**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Total Wajib Pajak</b>	<b>Wajib Pajak yang mendatar</b>	<b>Pertumbuhan wajib pajak (%)</b>
<b>2018</b>	Juli	226.944	700	157,35
	Agustus	227.599	655	-6.42
	September	228.392	793	21.06
	Oktober	229.085	790	-0.38
	November	229.760	675	-2.60
	Desember	229.811	721	-6.81
<b>Rata-rata</b>				<b>27,03</b>

*Sumber : penerimaan wajib pajak perbulan KPP pratama kedaton 2018*

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang di lakukan Widya Tjiali tahun 2015, namu perbedaannya terletak pada variabel independennya yakni dipenelitian Widya Tjiali hanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian Widya Tjiali mengambil tempat penelitian di KPP Pratama Bitung dan Dalam kesempatan ini peneliti mengambil jumlah pertumbuhan wajib pajak yang tertera pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung )”.



#### **D. Rumusan masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPH atas penghasilan terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak ?
2. Bagaimana Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPH atas penghasilan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak menurut pandangan Ekonomi Islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPH atas penghasilan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung;
2. Untuk menjelaskan bagaimana Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPH atas penghasilan terhadap pertumbuhan Jumlah wajib pajak menurut pandangan Ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan bagi penulis tentang Perpajakan dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Akuntansi Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **2. Bagi Almamater**

Dapat dijadikan rujukan dan tolak ukur bagaimana sistem perpajakan di Indonesia ini, khususnya mahasiswa Akuntansi Syari'ah. Dan memberikan gambaran bagi akademisi mengenai peraturan pemerintah terhadap manfaat manajerial atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

### **3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam memaksimalkan pajak penghasilan dari pelaku usaha. Dapat dijadikan rujukan dan tolak ukur bagaimana sistem perpajakan di Indonesia ini, khususnya mahasiswa Akuntansi Syari'ah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-penemuan yang tidak menggunakan prosedur statistik atau pengukuran, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif. Metode ini berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah ( sebagai lawannya adalah eksperimen ), dan lebih menekankan makna.<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif lebih mendasarkan pada penalaran logis, pemahaman interpretasi terhadap objek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).

### b. Sifat Penelitian

Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2014), h. 34

<sup>20</sup> Emzir, *metodelogi penelitian pendidikan*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 21.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang berasal dari data sekunder dari KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada ( peneliti sebagai tangan kedua ).<sup>21</sup> Beberapa data sekunder yang peneliti peroleh antara lain yaitu pengumpulan data-data dari pihak lapangan yakni di KPP Pratama Kedaton, internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau instansi, kelompok, dokumen, kejadian, suatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian. Populasi juga dapat di artikan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini populasi yang peneliti ambil

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet ke 20, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 80

<sup>22</sup> Albert Kurniawan, *metode penelitian*, h. 55.

adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data karakteristik dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>23</sup> Pada penelitian ini menggunakan sampel purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Adapun kriteria atau syarat penelitian adalah orang yang memiliki penghasilan lebih dari wajib pajak dan perusahaan yang memiliki NPWP.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara :

- a. *Interview*, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor pelayanan Pajak Pratama kedaton bandar Lampung, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet ke 20, h. 81.

jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ada di KPP Pratama Kedaton.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode ini berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dan lebih menekankan makna.<sup>24</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan wajib pajak. Perhitungan laju pertumbuhan menggunakan rumus berikut :<sup>25</sup>

$$GLT = \frac{LT_n - LT_{(n-1)}}{LT_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

GLT : Pertumbuhan Pajak

$LT_n$  : Penerimaan Pajak Bulan Sekarang

$LT_{n-1}$  : Penerimaan Pajak Bulan Sebelumnya

<sup>24</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2014), h. 89

<sup>25</sup> Halim, Abdul. 2004 *Menejemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. h. 163

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemahaman Perpajakan

##### 1. Pengertian pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>26</sup> Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>27</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat imbalan yang langsung di tunjukan.<sup>28</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Definisi Pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH

<sup>27</sup> Ilyas Waluyo. Perpajakan Indonesia jilid I. Jakarta. Salemba Empat. 2002. h. 45-47

<sup>28</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, (yogyakarta: ANDI YOGYAKARTA, 2007), h. 1



- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. Menurut Golongannya
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan.
  - 2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h.5

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.<sup>30</sup>

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 6

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu<sup>31</sup> :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

---

<sup>31</sup> Mujiyati dan Aris, *pengantar ilmu hukum pajak*, 2011 h. 6

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut R. Santonso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak yaitu<sup>32</sup> :

a. Teori Asuransi

Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya dan keselamatan harta bendanya. Untuk

---

<sup>32</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: andi yogyakarta, Edisi Terbaru 2018), h. 6

perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada Negara. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Teori ini merupakan dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan masing-masing warga Negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataan bahwa tingkat perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung pengertian bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang telah diberikan oleh Negara kepada negaranya, yaitu dengan melindungi atas diri mereka dari gangguan yang mengancam jiwa dan hartanya. Oleh karena itu diperlukan biaya-biaya untuk melaksanakan perlindungan tersebut sehingga beban tersebut harus dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya.

d. Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk dan patuh terhadap Negara, karena Negara yang telah diakui dengan eksistensinya baik oleh penduduk maupun Negara sebagai tempat tinggal penduduk yang bertugas melindungi segenap warganya. Oleh karena itu hubungan rakyat dengan Negara sangat kuat dan merupakan salah satu unsur Negara, maka penduduk wajib berbakti kepada Negara,

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem garis besar dalam perpajakan dikenal tiga system yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding tax system*.<sup>33</sup> Di Indonesia pernah melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a *Official Assesment System*

Adalah sistem yang mempunyai wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak fiskus.

---

<sup>33</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak. “*perpajakan*” (yogyakarta Andi edisi terbaru 2018)  
h.9

b *Self Assessment System*

Adalah sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c *With Holding System*

Adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung pada kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ciri-cirinya yaitu : wewenang menentukan



besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 6. Pajak Menurut Syariat Islam

Pajak Menurut Syariat Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba*, *yadh ribu*, *dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah* yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *sim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. *dharibah* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pajak adalah QS. Al-Taubah[9] ayat 29 sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak

---

<sup>34</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 28

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 29)".<sup>35</sup>

(Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian) jika tidak demikian niscaya dari dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. (dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya) seperti khamar (dan tidak beragama dengan agama yang benar) yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama Islam (yaitu orang-orang) lafal alladziina pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal alladziina pada awal ayat (yang diberikan Alkitab kepada mereka) kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani (sampai mereka membayar jizyah) kharaj yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun (dengan patuh) lafal yadin berkedudukan menjadi hal/kata keterangan, artinya, secara taat dan patuh, atau mereka menyerahkannya secara langsung tanpa memakai perantara atau wakil (sedangkan mereka dalam keadaan tunduk) yaitu patuh dan taat terhadap peraturan/hukum Islam.<sup>36</sup>

Secara bahasa *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai

---

<sup>35</sup> Tafsir ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29", tersedia di: <https://tafsirq.com/9-attaubah/ayat-29#tafsir-jalalayn> (24 JUNI 2019)

<sup>36</sup> *Ibid*,

ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>37</sup>

Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis non-Islam yaitu<sup>38</sup> :

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Yahya, *http:// Hayatulislam. Net*, Jurnal SaifullahAhisri, Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pajak Islam.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.33

- c. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.<sup>39</sup>
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Apabila sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (*tax*),

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.33

pajak tidak akan dihapus karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar.<sup>40</sup>

#### 7. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>41</sup>.

### B. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

#### 1. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 1 %. Tahun pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.<sup>42</sup> Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.34

<sup>41</sup> Alifia. 2015, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 “*tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*” th 2013

memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

## 2. Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>43</sup> :

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

## 3. Peredaran Bruto

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, diatur sebagai berikut<sup>44</sup> :

- 1) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun

---

<sup>43</sup> *Ibid*, pasal 2

<sup>44</sup> *Ibid*, pasal 10

Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dus belas) bulan;

- 2) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
- 3) Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

### **C. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0.5%.

#### **1. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto



tertentu yaitu tidak melebihi 4.8 milyar dalam satu tahun pajak dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5 % dari omset penjualan.<sup>45</sup>

2. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 tahun 2018
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

3. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah :
  - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut<sup>46</sup> :

- 1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

---

<sup>46</sup> *Ibid*, pasal 5

- 1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- 2) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**D. Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Nomor 23 Tahun 2018**

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018**

Penjelasan	PP Nomor 46 Tahun 2013	PP Nomor 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WP Orang Pribadi</li> <li>• WP Badan tidak termasuk BUT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak Orang Pribad</li> <li>• WP Badan tertentu               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PT</li> <li>✓ CV dan Firma</li> <li>✓ Koperasi</li> </ul> </li> </ul>

Pengecualian Subjek Pajak	<p>Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:</p> <p>a Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan</p> <p>b Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan</p> <p>Wajib Pajak badan yang :</p> <p>a belum beroperasi secara komersial; atau</p> <p>b dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8M</p>	<p>a Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh</p> <p>b Persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan.</p> <p>c WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94</p> <p>d Bentuk Usaha Tetap</p>
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam 1 Tahun Pajak.	
Pengecualian Objek Pajak	<p>a .Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;</p> <p>b .Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri;</p> <p>c Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan</p> <p>d Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.</p>	
Tarif	1%	0.5%

Batasan Waktu	Tidak ada	1. WP OP : 7 tahun 2. CV/Firma/Koperasi: 4 tahun 3. PT : 3t ahun Dihitung sejak : WP lama :Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru :Tahun Pajak terdaftar
DPP	a Setor Sendiri b Dibebaskan dari pemotongan/ pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	1. Setor Sendiri ; atau 2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP.
Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Sumber : <https://forumpajak.org/pph-final-umkm-perbedaan-pp-46-tahun-2013-dengan-pp-23-tahun-2018/>

#### E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Corry (2013) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat(2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus

meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.<sup>47</sup>

Kedua, Hakim (2015) dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP. No. 46/2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah terjadi penurunan sebesar 0,23%. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.<sup>48</sup>

Ketiga, Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere (2017), dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2). Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan PP.No. 46/2013 terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak teraftar dan penerapan PP.No. 46/2013 berkontribusi terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Luwuk. Metode penelitian

---

<sup>47</sup> Corry, *Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat(2) th 2013*

<sup>48</sup> Hakim (2015), *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini Terjadi penurunan Wajib Pajak sebesar -2,43% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013.<sup>49</sup>

Dari penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu yang menjadi salah satu rujukan peneliti, dengan letak perbedaannya penelitian yang hendak peneliti teliti dari segi objek penelitiannya, yakni peneliti menggunakan sampel Perusahaan yang berbeda dan tahun yang berbeda. Peneliti mengambil Perusahaan yang terletak di Bandar Lampung, Kec. Kedaton yaitu di KPP Pratama Kedaton dan data yang diambil adalah dari sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

---

<sup>49</sup> Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere, *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)*. th 2017



## DAFTAR PUSTAKA

- Alifia. 2015, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Untuk Membayar Pajak*, Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Solo, Solo.
- Corry, *Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat(2) th 2013*
- Definisi Pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH
- Depatemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, gamedia pustaka utama, jakarta 2008,
- Emzir, *metodelogi penelitian pendidikan*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2012),
- Farid Muhammad. *Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan, Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Mukaddimah. Vol 18, Nomor 1 2012
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2017),
- Hakim, *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) tahun 2015*
- Handoko. 2009. *Ekonomi Islam: Pajak dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ilyas Waluyo. *Perpajakan Indonesia* jilid I. Jakarta. Salemba Empat. 2002.
- Islam Digest Republika, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/04/04/p6nk7k313-sistem-perpajakan-dalam-islam/25/09/19>. 19:50

Isroah, universitas negeri yogyakarta 2013, *perpajakan*,

Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere, *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)*.th 2017

Kementerian keuangan republik indonesia/*DJP laporan tahunan 2017*.

Mardiasmo,*perpajakan* Yogyakarta:andi yogyakarta, edisi terbaru, 2013

Mardiasmo, *perpajakan*,(Yogyakarta:andi yogyakarta, edisi terbaru 2018),

Mujiyati dan Aris, *pengantar ilmu hukum pajak*, 2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak*, 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan

Perbedaan PP No 46 dan 23, <https://forumpajak.org/pph-final-umkm-perbedaan-pp-46-tahun-2013-dengan-pp-23-tahun-2018/>. Diakses tanggal 23/07/2019. 12:20 WIB

Profil KPP Pratama Kedaton 2018

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Sanksi pidana pajak' Online tersedia di : <https://www.online-pajak.com/sanksi-pidana-pajak> (4 Agustus 2019) At :13:53 WIB.

Setyawati, Eka. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas* ". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Sistem informasi direktorat jendral pajak "*peraturan perundang-undangan* " tahun 2018

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2014),

Sugiyono. “*Metode Penelitian Bisnis*”, Alfabeta, Bandung, 2014.

Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Edisi Revisi, (jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Windy Nawir Mansyur, “*Analisis Penerapan Psak No. 46 pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal*

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009 ).

Abdurrahman Yahya, *http:// Hayatulislam. Net*, Jurnal Saifullah Ahisri, Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pajak Islam.

As-sarahsi, *al-mabsuth*, dalam yahya abdurrahman, *dharibah* (pajak), <http://hayatulislam.net>, 28/09/2019 07:20

Susanto, Herry, 2012. “Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

Tafsir ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29”, tersedia di: <https://tafsirq.com/9-attaubah/ayat-29#tafsir-jalalayn>